

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arto, A. Mukti, 2008, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Asnawi, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, UII Press, Yogyakarta.

Assiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-undang*, Rajawali Press, Jakarta.

Basyir, Ahmad Azhar, 1980, *Hukum Perkawinan Islam Disertai Perbandingan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Chazawi, Adami, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 1993, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 1997, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta.

_____, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamami, Taufiq, 2003, *Mengenal Lebih Dekat: Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung.

Hutagalung, Sophar Maru, 2010, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2014, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lubis, Sulaiman, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, 2008, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.

Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004*, 2007, FH UII Press, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.

_____, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Musthofa, 2005, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.

Nawawi, Haidar, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Nuruddin, Amir, Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Panggabean, Henry Pandapotan, 2005, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____ dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Rony Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Soemiyati, 1997, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty Yogyakarta.

Soepomo, 2004, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia, Jakarta.

Suriasumantri, Jujur S, 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta.

Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Witanto, Djoni, 2015, *Penafsiran Pasal 67 Huruff UU Mahkamah Agung Tentang Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Nyata Sebagai Alasan Peninjauan Kembali*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta

B. Karya Ilmiah/Jurnal

Ali, Alfarabi, 2014, “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1776/Pdt.G/2011/PA.Sda Oleh Pengadilan Agama Tinggi Surabaya Nomor 307/Pdt.G/2012/PTA.Sby Tentang Cerai Talak”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Arifin, Ahmad, 2015, “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 224/Pdt.G/2011/PTA.Smg Tentang Cerai Talak”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Satrio, Dwi Bintang, Efa Laela Fakhirah, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Putusan Arbitrase Nasional Dihubungkan Dengan Prinsip Access To Justice”, *Jurnal*, Bina Mulia Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

C. Internet

Anonim, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/khilaf>, pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 10.18 WIB.

_____, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/keliru>, pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 10.18 WIB.

_____, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/nyata>, pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 10.18 WIB.

Hasanudin, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek* diakses melalui <http://pn->

tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-Hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/ , pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 09.18 WIB.

Yasin, Muhammad, *Makna Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5778a934e3ab2/makna-kekhilafan-Hakim-atau-kekeliruan-nyata>, pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 09.56 WIB.

D. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611).

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama).

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 1378/Pdt.G/2013/PA.Bla.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 68/PK/Ag/2014.

Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1217/Pdt.G/2013/PA.Cjr.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/PK/Ag/2015.

Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1420/Pdt.G/2014/PA.Grt.

Putusan Mahkamah Agung 31/PK/Ag/2015.